

Pembangunan Flyover Aloha sebagai Kebijakan Pemerintah Sidoarjo: Permudah Akses ke Bandara Internasional Juanda

Amiatun Nuryana ^{1*}

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

* amiatun.22003@mhs.unesa.ac.id

Abstract. Penelitian ini berupaya mengkaji kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo Jawa Timur dalam upaya mengatasi kemacetan di Bundara Aloha yang merupakan akses utama menuju Bandara Internasional Juanda. Kebijakan terkait pembangunan flyover Aloha tentunya dilakukan atas berbagai pertimbangan, hal yang paling utama adalah untuk mengatasi kemacetan dan mempercepat aktivitas masyarakat baik dalam perjalanan antar kota dan proses perdagangan, dan akses ke Bandara Internasional Juanda. Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif sebagai upaya untuk mendeskripsikan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka yang memanfaatkan literatur yang berkaitan dengan topic penelitian. Analisis data dilaksanakan dengan tiga tahapan yakni dengan upaya reduksi data, pengelompokan data, dan analisis data berdasar teori yang diaplikasikan. Berdasar upaya analisis data diperoleh hasil yakni keputusan mengenai pembangunan flyover diidentifikasi sebagai alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di Aloha setiap waktu. Pembangunan tersebut juga dinilai dapat berpotensi memberikan manfaat jangka Panjang bagi Masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan Pembangunan flyover Aloha dianggap sebagai Langkah yang strategis dan berkelanjutan. Dapat dipahami bahwa kebijakan pembangunan flyover Aloha memberikan kemudahan akses ke Bandara Internasional Juanda.

1. Pendahuluan

Kebijakan diketahui menjadi bagian dari proses pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan Warlina (n.d) kebijakan merupakan satu dari beberapa instrumen pemerintahan sebagai mata rantai utama dalam suatu proses operasionalisasi fungsi pemerintahan. Oleh karena itu suatu kebijakan yang dirancang pemerintah hendaknya dapat merepresentasikan fungsi dari suatu pemerintahan. Tiap-tiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan sebagai upaya memajukan daerah pemerintahannya. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dibuat untuk wilayah kota/kabupaten, atau desa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat di wilayah terkait (Mukhlis, 2023).

Perbaikan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah upaya yang dilakukan sebagai cara untuk mengatasi masalah yang terdapat di wilayah Sidoarjo, seperti kemacetan. Mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan kota satelit dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Sehingga perekonomian yang ada di kabupaten tersebut berkembang pesat, dan tentunya juga memerlukan perkembangan infrastruktur yang memadai dalam mengakomodir segala mobilitas Kabupaten Sidoarjo (Yusuf dan Utami, 2023).

Adanya perkembangan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo sangat memicu kemacetan yang terjadi di banyak titik pada wilayah Sidoarjo, khususnya di sepanjang ruas jalan Surabaya-Sidoarjo. Kemacetan yang terjadi bersumber dari masifnya jumlah kendaraan yang sangat banyak melewati jalanan, tetapi tidak sebanding dengan keadaan jalan yang tidak lebar. Sehingga arus lalu lintas terhambat karena volume kendaraan yang melintas tidak terakomodir oleh jalan yang sempit (Siagian, 2012). Jumlah kendaraan yang banyak juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ketiga terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018-2020 jumlah kendaraan di Kabupaten Sidoarjo, baik kendaraan roda dua maupun roda empat selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pertumbuhan kendaraan roda 2 rata – rata pada setiap tahunnya naik sebesar 5,7%. Sehingga dengan kenaikan jumlah kendaraan tersebut dapat memicu masalah transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas.

Flyover sering digunakan di area perkotaan dengan volume kendaraan yang sangat tinggi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan lalu lintas dengan memisahkan arus kendaraan yang berbeda (Sukatin, 2022). Sehingga dengan adanya *flyover*, selain dapat mengatasi kemacetan juga dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena arus kendaraan yang sama. Jika dibandingkan dengan jalan raya biasa, *flyover* justru dibangun secara tidak sebidang atau melayang guna menghindari persimpangan, perlintasan kereta api, atau wilayah lain yang cenderung mengalami kemacetan lalu lintas. Titik kemacetan yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo terdapat di Aloha, Sawotratap, Sidoarjo, tepatnya pada jalan Aloha atau di sepanjang jalan belakang restaurant Aloha. Dalam hal ini terjadi penumpukan berbagai macam kendaraan, baik kendaraan roda empat maupun roda dua hampir di titik tersebut (Baidhowi, 2019).

Selain itu, diketahui Jalan Raya Aloha merupakan akses utama untuk menuju Bandara Internasional Juanda. Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan pembangunan *flyover* Aloha. Diketahui Bandara Juanda sebagai bandara yang berstatus internasional tidak terlepas dari aktivitas penerbangan yang ramai baik untuk perjalanan bisnis, pribadi, dan aktivitas impor. Memberikan akses yang mudah ke Bandara internasional Juanda menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Sidoarjo. Sebab Bandara tersebut tepat berada Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sinergi pemerintah daerah Sidoarjo dengan kementerian PUPR dalam membangun *flyover* Aloha menjadi kebijakan untuk menanggapi kebutuhan dan memakmurkan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian berupaya memaparkan terkait kebijakan pemerintah daerah Sidoarjo dalam pembangunan *flyover* untuk mempermudah akses ke Bandara Internasional Juanda yang berada pada wilayah pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Secara khusus berupaya menyajikan konsep kebijakan daerah Sidoarjo dalam pembangunan *flyover* Aloha serta dipaparkannya efektivitas dari kebijakan pemerintah Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan *flyover* Aloha.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan dekspritif. Pengumpulan data menggunakan metode kajian literatur yang ebrkaitan dengan topik yang diangkat. Sumber data diperoleh dari pernyataan pemerintah Sidoarjo yang terdapat di portal berita daring. Bentuk pernyataan berupa teks tersebut menjadi data dalam penelitian ini. Proses analisis dilakukan dengan tiga tahapan meliputi penyaringan data, pengelompokkan data yang sesuai dengan subbab pembahasan, dan langkah terakhir dilakukan upaya analisis terhadap data sesuai pada teori yang diaplikasikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sinergi Pemerintah Daerah Sidoarjo dengan Kementerian PUPR Permudah Akses ke Bandara Internasional Juanda

Kebijakan yang dirumuskan selalu disertai dengan tindakan atau implementasi dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan yang dirancang sebaik apa pun tanpa diiringi implementasi, maka tidak akan banyak arti atau tidak dapat memberikan manfaat bagi rakyat Maunde (2021). Salah satunya kebijakan untuk mengatasi kemacetan tentu menjadi kebijakan yang diharapkan terealisasi atau terimplementasi secara tepat. Hal tersebut karena salah satu permasalahan nasional atau di Indonesia ini yakni kemacetan. Pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai solusi untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya kota Jakarta yang tahun 2021 lalu menempati rangking ke 46 sebagai kota termacet di dunia berdasar pada TomTom Traffic Index Rangking 2021. Peringkat kemacetan Jakarta diketahui selama empat tahun terakhir terus membaik dan tentunya menjadi angin segar bagi pelaku kebijakan (jakartamrt.co.id). Selain di Jakarta, Sidoarjo juga menjadi salah satu wilayah yang berupaya mengatasi permasalahan mengenai kemacetan. Secara khusus di wilayah Kecamatan Sedati tepatnya Bundaran Aloha yang menjadi akses ke Bandara Internasional Juanda.

Berdasarkan pertimbangan wilayah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil kebijakan pembangunan *flyover* di Bundaran Aloha karena kondisi letak jalan dan frekuensi kepadatan kendaraan di saat pagi dan sore hari. Pembangunan *flyover* Aloha dipilih untuk menjadi solusi bagi kemacetan yang terjadi hampir di setiap hari dan sepanjang waktu, khususnya di Bundaran Aloha, Sawotratap, Sidoarjo (Rahmansyah, 2023). Sehingga kebijakan tersebut dapat menguntungkan masyarakat dengan memberikan kenyamanan saat melintasi jalan Surabaya-Sidoarjo.

Selain sebagai peningkatan akseibilitas Jalan Lintas Pantura Provinsi Jawa Timur, tujuan lain dari pembangunan *flyover* Aloha adalah memudahkan akses menuju Bandara Internasional Juanda (Salatun,

et al., 2023). Kebijakan mengenai pembangunan *flyover* Aloha memiliki banyak implikasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Masyarakat, seperti ekonomi, lingkungan dan sosial. Pengambilan keputusan mengenai pembangunan *flyover* Aloha harus dipikirkan dengan matang dan sempurna, karena menyangkut kepentingan banyak orang. Diperlukan analisis mendalam untuk mempelajari bahwa keputusan pembangunan ini merupakan keputusan dan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di bundaran Aloha.

Sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun *flyover* Aloha, maka diperlukan beberapa analisis penunjang, seperti analisis dampak lalu lintas yang sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2021, dalam Pasal 2 Ayat (1), yakni setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pada Pasal 2 Ayat (5) yang dimaksud infrastruktur yang dimaksud dalam ayat 1 adalah akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), terowongan (*tunnel*), dan/atau infrastruktur lainnya. Serta pada Pasal 5 Ayat (1) rencana pembangunan infrastruktur sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pengambilan Keputusan Upaya Menentukan alternatif kebijakan Untuk Mengurangi kemacetan di Kabupaten Sidoarjo

Model dalam pengambilan Keputusan untuk menentukan alternatif kebijakan sebagai upaya mengurangi kemacetan di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan model rasional. Model ini memandang pengambil Keputusan sebagai manusia yang rasional. Dengan kata lain selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimalan nilai di dalam lingkup keterbatasan-keterbatasan tertentu. Pengambilan keputusan menurut Harrison merupakan suatu proses dalam mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Tujuan dari pengambilan keputusan adalah mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut supaya keputusan yang diambil atau dipilih tidak dapat membuat atau menimbulkan suatu kerugian (Tarsila, 2015). Terdapat enam langkah dalam model rasional pengambilan keputusan:

1. *Define the Problem*
2. *Identify the Decision Criteria*
3. *Allocate Weights to the Criteria*
4. *Develop the Alternatives*
5. *Evaluate the Alternatives*
6. *Select the Best Alternatives*

Dalam proses pengambilan keputusan selalu menempatkan penetapan masalah dengan jelas sebagai langkah awal dari proses pengambilan keputusan. Maka asumsi dibangun dalam model pengambilan keputusan menempatkan penetapan masalah secara jelas pada poin pertama. Adapun asumsi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masalah ditetapkan secara jelas dan tidak mempunyai arti ganda.
2. Pengambil keputusan memiliki akses terhadap informasi yang sempurna.
3. Pengambil keputusan dapat mengidentifikasi seluruh kriteria yang relevan dan dapat membuat alternatif yang dapat direalisasikan.
4. Pengambil keputusan sadar akan ada konsekuensi dari setiap alternatif pilihannya.
5. Seluruh kriteria dan alternatif dapat dirangking untuk merefleksikan setiap nilai kepentingannya.
6. Kriteria yang bersifat khusus bernilai konstan.
7. Pengambil keputusan akan memilih alternatif solusi yang nilai kepuasannya tertinggi (Febriansah & Meiliza, 2020).

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang terutama bagi seorang pemimpin. Organisasi akan berjalan sesuai fungsinya, apabila para pemimpinnya memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan mampu menerapkannya kepada anggota organisasi (Sahadi dkk, 2020). Keputusan biasanya diambil ketika terjadi suatu masalah, untuk memecahkan atau mengatasi

masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Ketika menemukan solusi dari sebuah masalah, maka diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi. Dengan demikian dapat diketahui terkait pengambilan keputusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pembangunan *flyover* Aloha. Selain itu juga dapat pula diketahui mengenai proses pengambilan keputusan, yang meliputi hambatan dan tantangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, implikasi keputusan, serta respons pemerintah untuk partisipasi dan suara masyarakat dalam mempertimbangkan keputusan pembangunan *flyover* Aloha.

Discussion

Define the Problem

Pembangunan *flyover* Aloha merupakan bentuk upaya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di ruas Surabaya-Sidoarjo. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan di perlintasan kereta api yang menjadi titik rawan kemacetan utama. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga (BBPJM) bertugas melakukan pembangunan struktur *flyover*. Dalam merealisasi kebijakan tersebut, proyek Pembangunan *flyover* Aloha akan fokus pada mutu, efisiensi biaya, dan kepatuhan terhadap jadwal, mengingat lokasi pembangunan berdekatan dengan jalan nasional dan jalur kereta api. Koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur lalu lintas selama pembangunan, terutama pada jam sibuk, juga menjadi prioritas. Dengan demikian, pernyataan masalah berpusat pada pengelolaan efektif pembangunan *flyover* Aloha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, memastikan pembebasan lahan dan konstruksi dilakukan dengan efisien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan, sambil meminimalkan gangguan terhadap infrastruktur transportasi yang sudah ada. Keberhasilan proyek ini akan diukur dari kemampuannya untuk secara signifikan meningkatkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di bundaran Aloha. Dengan adanya *flyover* atau jalur tambahan di Aloha, volume kendaraan yang dapat dilewati secara bersamaan meningkat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan parah. *Flyover* dapat memisahkan arus lalu lintas dengan efektif, di mana arus lalu lintas dari jalan utama dipisahkan dari arus lalu lintas yang ingin berbelok atau bergabung ke jalan lain. Hal ini tidak hanya memperlancar aliran lalu lintas tetapi juga mengurangi konflik antara kendaraan yang bergerak dalam arah yang berbeda. *Flyover* dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi perjalanan dengan mengurangi hambatan seperti lampu merah atau persimpangan yang memperlambat arus lalu lintas. Selain itu, *flyover* juga berkontribusi pada peningkatan keamanan jalan raya dengan memisahkan arus lalu lintas dari persimpangan atau titik-titik kemacetan. Dengan mengurangi interaksi antara kendaraan yang bergerak dalam arah yang berbeda, risiko kecelakaan dapat dikurangi secara signifikan. *Flyover* menyediakan struktur yang aman untuk kendaraan melintasi area yang padat lalu lintas, mengurangi potensi tabrakan dan konflik antara kendaraan. Secara keseluruhan, pembangunan *flyover* adalah solusi yang efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di daerah-daerah dengan volume kendaraan tinggi. Dengan memberikan jalur tambahan, memisahkan arus lalu lintas, meningkatkan kecepatan perjalanan, dan meningkatkan keamanan jalan raya, *flyover* dapat memberikan manfaat besar bagi pengguna jalan serta mengoptimalkan penggunaan infrastruktur transportasi yang ada (Lailani, 2017).

Identify the Decision Criteria

Terdapat beberapa kriteria penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan keputusan mengenai kebijakan pemerintah Sidoarjo terhadap pembangunan *flyover* Aloha. Dalam hal ini, diperlukan untuk mengevaluasi dan memilih tindakan yang paling sesuai demi keberhasilan dalam mengatasi kemacetan di Sidoarjo. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan aliran lalu lintas menjadi kriteria utama untuk menilai seberapa efektif keputusan yang diambil akan memperbaiki kelancaran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di area yang ditargetkan. Para pengambil keputusan akan menilai apakah proyek ini berhasil mengatasi masalah lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan.
- b. Anggaran. Anggaran juga menjadi kriteria penting yang meliputi analisis biaya proyek, biaya pemeliharaan, dan potensi penghematan jangka panjang akibat perbaikan kondisi lalu lintas. Pengambil keputusan akan mempertimbangkan anggaran proyek dan apakah manfaatnya melebihi biayanya.

The second paragraph The second paragraph.

The third paragraph The third paragraph.

3.3.1. *This is an example of a subsection.* Note that the text for subsection headings should be run into the text of the first paragraph.

3.3.2. *This is an example of a subsection.* Note that the text for subsection headings should be run into the text of the first paragraph.

3.3.3. *This is an example of a subsection.* Note that the text for subsection headings should be run into the text of the first paragraph.



Figure 1. The name of figure 1

Table 1. The name of table 1

Column 1	Column 2	Column 3
Row 1	Aaa	Www
Row 2	Bbb	Xxx
Row 3	Ccc	Xxx
Row 4	Ddd	Yyy
Row 5	Eee	Zzz

Source: The source of the table

4. Kesimpulan

Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo dengan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan membangun *flyover* Aloha, sebab di situ merupakan titik yang sering terjadi kemacetan. Dalam Pembangunan tersebut, pemerintah daerah dan Kementerian PUPR sangat memperhatikan dengan jelas mengenai kualitas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan guna keberhasilan proyek yang besar itu. Dalam menentukan keputusan terkait kebijakan pemerintah Sidoarjo terhadap pembangunan *flyover* Aloha terdapat beberapa kriteria yang menjadi faktor tertentu, yaitu seperti peningkatan aliran lalu lintas, anggaran, kualitas, keamanan, kemudahan penggunaan, dan manfaat jangka panjang. Dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), keputusan mengenai pembangunan *flyover* diidentifikasi sebagai alternatif terbaik untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang terjadi di Aloha setiap waktu. Pembangunan tersebut juga dinilai dapat berpotensi memberikan manfaat jangka Panjang bagi Masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan Pembangunan *flyover* Aloha dianggap sebagai Langkah yang strategis dan berkelanjutan, dengan dapat memecahkan masalah lalu lintas di Sidoarjo dan dapat meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan infrastruktur transportasi yang ada.

Adanya Pembangunan *flyover* Aloha sebagai solusi untuk kemacetan yang terjadi, khususnya di pagi dan sore hari diharapkan dapat menjadi contoh untuk solusi kemacetan di titik-titik lain, khususnya di daerah Sidoarjo. Mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan kota satelit dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Surabaya. Sehingga dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan raya dapat meringankan kemacetan yang terjadi. Peningkatan infrastruktur tersebut dapat berupa Pembangunan *flyover*, *underpass*, dan terowongan. Meskipun banyak anggaran yang dibutuhkan, tetapi hal ini dapat bermanfaat untuk jangka panjang.

References*

- [1] Baidhowi, Ahmad. (2019). Analisis Kemacetan di Ruas Jalan Raya Aloha Sidoarjo. *Swara Bhumi*, 1(3), 1-7.
- [2] Febriansah, Rizky E., Meiliza, Dewi R. (2020). *Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- [3] Lailani. (2017). Strategi Pemerintah Desa Buat Meningkatkan Partisipasi Warga desa dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi dalam Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790–798.
- [4] Mukhlis. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah. Diunggah 27 Februari 2023. <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.
- [5] Rahmansyah, Difa A. (2023). Analisis Keefektifan Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pembangunan Flyover Krian Guna Menanggulangi Kemacetan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)*, 3(3), 53-63.
- [6] Sahadi, Dkk. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal dalam Organisasi. *MODERAT*, 6(3), 513-524.
- [7] Salatun, Ika A., Dkk. (2023). Rencana Manajemen Lalulintas Pembangunan *Flyover* Aloha Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal Media Komunikasi Dunia Ilmu Sipil (MoDuluS)*, 5(3), 66-76.
- [8] Satka. (2015). Startegi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Warga desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang). *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2015, 3 (4), 1863–1876.
- [9] Siagian. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi serta Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.